



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BABII

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 PENELITIAN TERDAHULU

Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan referensi dalam melakukan penelitian ini. Pertama, penelitian terdahulu dengan judul "Repersentasi Anti Korupsi Dalam Film (Sebuah Analisis Semiotika Peirce Pada Film *Selamat Siang, Risa*)" yang disusun oleh Fenny Djaja dari Universitas Multimedia Nusantara, Serpong, pada 2014. Objek penelitian ini adalah film yang berjudul *Selamat Siang, Risa*. Tujuan dari penelitian tersebut adalah mengetahui bagaimana makna dan tanda yang merepresentasikan antikorupsi dalam film *Selamat Siang, Risa*.

Penelitian yang dilakukan oleh Fenny ini menggunakan metode analisis semiotika model Charles Sanders Peirce. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sudut pandang yang diambil dalam film *Selamat Siang, Risa* tersebut jelas mengenai antikorupsi. Jalan cerita yang disajikan jelas merepresentasikan antikorupsi.

Penelitian terdahulu di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti, yaitu pada topik yang diangkat mengenai antikorupsi.

Sementara perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang disusun peneliti

terletak pada metode yang digunakan. Pada penelitian terdahulu, metode yang digunakan adalah metode analisis semiotika model Charles Sanders Peirce, sedangkan peneliti menggunakan metode analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk.

Perbedaan lain juga terletak pada objek penelitian yang digunakan. Pada penelitian terdahulu, objek yang digunakan adalah sebuah film yang berjudul *Selamat Siang, Risa* karya Ine Febriyanti yang bekerja sama dengan Transparency International Indonesia (TII) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan objek penelitian yang digunakan peneliti adalah dua lirik lagu berjudul *Bangsat* dan *Rekening Gendut* karya Iwan Fals.

Penelitian terdahulu kedua yang peneliti gunakan sebagai acuan adalah penelitian milik Muhammad Ibnu Pazar, mahasiswa komunikasi Universitas Padjadjaran, Bandung dengan judul penelitian "Wacana Korupsi di Tubuh Kepolisian dalam Pemberitaan Rekening Gendut Perwira Polisi dalam Majalah Berita Mingguan Tempo (Analisis wacana Kritis Model Norman Fairclough mengenai Wacana Korupsi di Tubuh Kepolisian dalam Pemberitaan Rekening Gendut Perwira Polisi di Majalah Berita Mingguan Tempo Edisi 28 Juni-4 Juli 2010)". Objek penelitian ini adalah teks berita mengenai Rekening Gendut Perwira Polisi dalam Majalah Berita Mingguan Tempo edisi 28 Juni-4 Juli.

Dalam penelitian ini, Ibnu menggunakan analisis wacana kritis model Norman Fairclough untuk membedah mengungkap, menelusuri wacana dibalik teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural yang dibentuk Majalah Tempo. Dari hasil penelitian analisis wacana kritis model Fairclough ini, menunjukan bahwa Tempo dalam analisis wacana kritis model peneltian Norman Fairclough, mewacanakan gerakan antikorupsi seharusnya dimulai dari penegak hukum itu sendiri. Pada aspek komodifikasi pada pendekatan ekonomi-politik Vincent Mosco dapat diidentifikasi bahwa ada hubungan komersialisasi dalam mewacanakan hal ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang disusun oleh peneliti, yakni tema yang diangkat dalam penelitian adalah mengenai korupsi dan menggunakan metodologi analisis wacana kritis. Sementara perbedaannya terletak pada model yang digunakan dalam analisis wacana kritis. Penelitian terdahulu menggunakan analisis wacana kritis model Fairclough, sedangkan meneliti menggunakan model Teun A. van Dijk. Selain itu, perbedaan juga terlihat pada objek penelitian. Objek penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah teks berita pada majalah berita mingguan Tempo, sementara objek penelitian pada penelitian ini adalah dua teks lagu yang berjudul *Bangsat* dan *Rekening Gendut* milik Iwan Fals.

Penelitian terdahulu lainnya adalah penelitian "Wacana Antikorupsi dalam lirik-lirik lagu pada album *Frekuensi Perangkap Tikus*: Sebuah Studi Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk" yang disusun oleh Natasha Erika. Objek penelitian ini adalah lirik-lirik lagu bertema antikorupsi pada album kompilasi bertajuk *Frekuensi Perangkap Tikus*. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk melakukan analisis kritis terhadap album kompilasi *Frekuensi Perangkap Tikus* dalam mewacankan antikorupsi.

Dalam penelitian tersebut, Natasha menggunakan analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk untuk membedah lebih mendalam di balik lirik-lirik lagu melalui tiga level, yakni teks, kognisi sosial dari pencipta lagu dalam album kompilasi *Frekuensi Perangkap Tikus* selaku pemakai bahasa, dan pengaruh konteks sosial yang ada. Dari penelitian terdahulu tersebut, menunjukan bahwa wacana yang berkembang dalam masyarakat mengenai perlawanan terhadap tindak pidana korupsi sesuai dengan kognisi yang ada pada para pencipta lagu dalam album *Frekuensi Perangkap Tikus*.

Penelitian terdahulu di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang disusun oleh peneliti, yakni menganalisis wacana antikorupsi yang terdapat dalam lirik-lirik lagu dengan menggunakan analisis wacana kritis model Teun A. Van Dijk. Sementara perbedaan penelitian terdapat pada objek penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan lirik-lirik lagu yang mengusung tema antikorupsi dalam album kompilasi *Indonesia Corruption Watch* (ICW) bertajuk *Frekuensi Perangkap Tikus* yang dinyanyikan oleh berbagai penyanyi indie, sedangkan peneliti dalam penelitian ini menggunakan lirik-lirik dalam dua lagu karya Iwan Fals yang berjudul *Bangsat* dan *Rekening Gendut* dalam album bertajuk *Raya*.

Berdasarkan tiga penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, maka penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Lebih singkat, tiga penelitian yang telah dipaparkan di atas dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

Nama	Fenny Djaja	Muhammad Ibnu	Natasha Erika	
Peneliti	4	Pazar		
		Pazar		
Judul	Representasi Anti	Wacana Korupsi di	Wacana Antikorupsi	
Penelitian	Korupsi Dalam	Tubuh Kepolisian	Dalam Lirik-Lirik	
- 10	Film (Sebuah	dalam Pemberitaan	Lagu Pada Album	
	Analisis Semiotika	Rekening Gendut	Frekuensi Perangkap	
	Peirce Pada Film	Perwira Polisi dalam	Tikus: Sebuah Studi	
	Selamat Pagi,	Majalah Berita	Analisis Wacana	
	Risa)	Mingguan Tempo	Kritis Teun A. van	
		(Analisis wacana	Dijk	
100		Kritis Model Norman		
700		Fairclough		
- 3		mengenai Wacana		
		Korupsi di Tubuh		
	-	Kepolisian dalam		
		Pemberitaan Rekening		
		Gendut Perwira Polisi		
		di Majalah Berita		
	0 00	Mingguan Tempo		
	III II'N.	Edisi 28 Juni-4 Juli		
		2010)		
Pendekatan	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	
penelitian	# H W		700	
Matadala	Analisis Camietil	Analisia Wi	Analisis Wi	
Metodologi	Analisis Semiotika	Analisis Wacana	Analisis Wacana	
	Charles Sanders	Kritis Norman	Kritis Teun A. van	
	Peirce	Fairclough	Dijk	

Hasil	sudut pandang	menunjukkan bahwa	Wacana yang
Penelitian	yang diambil dalam	Tempo dalam analisis	berkembang dalam
	film Selamat Siang,	wacana kritis	masyarakat mengenai
	Risa tersebut jelas	model peneltian	perlawanan terhadap
	mengenai	Norman Fairclough,	tindak pidana korupsi
	antikorupsi. Jalan	mewacanakan gerakan	sesuai dengan kognisi
4	cerita yang	antikorupsi	yang ada pada para
	disajikan jelas	seharusnya	pencipta lagu dalam
	merepresentasikan	dimulai dari penegak	album Frekuensi
	antikorupsi.	hukum itu sendiri.	Perangkap Tikus
		Pada aspek	hingga sesuai dengan
		komodifikasi pada	teks-teks lagu yang
		pendekatan	diproduksi, yakni
		ekonomi-politik	Suap-Suap, Di
		Vincent Mosco dapat	Sekolah-Sekolah,
		diidentifikasi bahwa	Partai Anjing dan
- 3		ada hubungan	Vonis.
	_	komersialisasi	
	-	dalam mewacanakan	
		hal ini.	



2.2 KONSEP YANG DIGUNAKAN

2.2.1 KORUPSI

Korupsi sebagai sebuah fenomena yang terkait dengan tindak penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan telah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh para ilmuan dan filosof, salah satunya Aristoteles. Sejak awal, Aristoteles yang diikuti oleh Machiavelli telah merumuskannya sebagai korupsi moral atau moral corruption yang merujuk pada berbagai bentuk konstitusi yang sudah melenceng, sehingga para penguasa rezim beserta dengan sistem demokrasi tidak lagi dipimpin oleh hukum, namun hanyalah berupaya melayani dirinya sendiri (Semma, 2008, h. 32).

Sementara Brooks merumuskan korupsi sebagai sebuah tindakan yang dengan sengaja melakukan kesalahan dan kelalaian serta penyelewengan kekuasaan yang sudah diketahuinya sebagai kewajiban, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, baik sedikit maupun banyak yang diperuntukan atas nama pribadi (Alatas, 1987, h. vii).

Berbeda dengan Aristoteles dan Brooks, Hafidhuddin memberikan gambaran mengenai korupsi dalam perspektif islam bahwa korupsi termasuk dalam perbuatan *fasad* atau perbuatan yang merusak tatanan kehidupan. Dalam hal ini, pelaku yang melakukan korupsi termasuk ke dalam kategori melakukan *jinayah kubro* atau dosa besar yang diperbolehkan bahkan diharuskan dikenai sanksi dibunuh, disalib,

dipotong tangan dan kakinya dengan cara menyilang (tangan kanan dengan kaki kiri atau sebaliknya), atau diusir (Semma, 2008, h. 33).

Pendapat lain diungkapkan oleh Klitgaard yang mendefinisikan korupsi sebagai tindak tingkah laku menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (individu, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Klitgaard kemudian merumuskan korupsi kedalam dalam bentuk sistematis, yakni C = M + D - A yang berarti *Corruption = Monopoly Power + Disrection by Official - Accountability*. Artinya, korupsi terjadi karena adanya monopoli atau kekuasaan dan diskresi (hak untuk melakukan penyimpangan kepada suatu kebijkan), namun dalam keadaan tidak adanya akuntabilitas (Arsyad, 2013, h. 4-5).

Sementara definisi korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Pidana Korupsi dalam pasal 2 dan 3, yakni 1) setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri, orang lain serta suatu korporasi yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan dan perekonomian negara. 2) setiap orang yang bertujuan memperkaya diri, orang lain serta korporasi, menyalahgunakan kewenangan, peluang atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap keuangan dan perekonomian negara.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi berarti penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh seorang pegawai bahkan pejabat pemerintah untuk mendapatkan tambahan pendapatan dari publik. Oleh karena itu, kedudukan publik telah dijadikan lahan bisnis, yang akan selalu diusahakan oleh pihak-pihak penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar (Semma, 2008, h. 35).

Alatas (1987, h. viii) menyebutkan secara ringkas mengenai ciriciri korupsi, yakni 1) suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan, 2) penipuan terhadap badan pemerintahan, lembaga swasta atau khalayak, 3) sengaja melalaikan kepentingan umum demi kepentingan pribadi, 4) dilakukan dengan rahasia, 5) melibatkan lebih dari satu pihak, 6) adanya kewajiban dan keuntungan bersama, baik dalam bentuk uang atau yang lain, 7) kegiatan korupsi terpusat pada yang menghendaki keputusan yang pasti dan dapat mempengaruhi, 8) adanya usaha untuk menutupi perbuatan korupsi dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum, dan 9) menunjukan fungsi kontradiktif pada pelaku korupsi.

Terdapat beberapa jenis korupsi secara umum menurut Caiden yang diuraikan Pope (2003, h. xxvi), yakni sebagai berikut:

- a) Berkhianat, subversi, transaksi luar negri ilegal, serta penyelundupan.
- b) Menggelapkan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, dan penipuan serta pencurian.

- c) Penggunaan anggaran yang tidak tepat, pemalsuan dokumen dan penggelapan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, penggelapan pajak, serta penyalahgunaan pajak.
- d) Penyalahgunaan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya.
- e) Menipu, mengecoh, memberi kesan yang salah, dan mencurangi, memberdaya, serta memeras.
- f) Melalaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesanksian palsu, menahan secara tidak sah, serta menjebak.
- g) Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel dengan yang lain seperti benalu.

Sementara, menurut Alatas (1987, h. ix), korupsi dapat dibagi menjadi tujuh jenis berdasarkan tipologinya, yakni korupsi transaktif (transactive corruption), korupsi yang memeras (extortive corruption), korupsi investif (investive corruption), korupsi perkerabatan (nepotistic corruption), korupsi defensif (defensive corruption), korupsi otogenik (autogenic corruption), dan korupsi dukungan (supportive corruption).

Korupsi transaktif merujuk pada adanya kesepakatan timbal-balik yang terjadi diantara pihak pemberi dan penerima demi mendapatkan keuntungan kedua belah pihak dan secara aktif diusahakan untuk tercapainya keuntungan tersebut. Korupsi jenis ini biasanya terjadi dalam dunia usaha dan pemerintah atau masyarakat dan pemerintah. Jenis korupsi memeras atau *extortive corruption* merupakan jenis korupsi yang

terjadi pada saat pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuapan guna mencegah terjadinya kerugian yang tengah mengancam diri, kepentingan dan pihak lain serta hal-hal lain yang dihargainya.

Jenis korupsi defensif merupakan jenis korupsi merujuk pada perilaku korban korupsi dengan pemerasan yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri. Korupsi jenis investif merupakan korupsi yang dilakukan dengan cara pemberian barang atau jasa tanpa adanya hubungan langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan mendatang. Korupsi jenis nepotisme merupakan pemilihan yang tidak sah terhadap orang terdekat untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan khusus kepada orang terdekat yang bertentangan dengan norma atau aturan yang berlaku.

Korupsi jenis otogenik atau autogenic corruption merupakan jenis korupsi yang dilakukan oleh satu pihak saja, tidak adanya pihak lain yang terlibat di dalamnya. Terakhir, korupsi jenis dukungan yang tidak secara langsung berhubungungan dengan uang dan imbalan langsung dalam bentuk lain. Dalam korupsi ini, tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.

Melihat sejarahnya, korupsi memang bukanlah hal yang baru. Korupsi juga sudah menjadi salah satu masalah global. Apabila telah banyak terjadinya tindak pidana korupsi, namun hanya sedikit koruptor yang diproses, ditambah dengan hukuman yang ringan, serta tidak adanya pertanggungjawaban terhadapat publik, maka korupsi akan terus ada, bahkan merajalela. Di awal kemerdekaan, korupsi merupakan suatu tindakan yang memalukan, di era reformasi jauh lebih memprihatinkan, karena tidak mengenal waktu dan situasi. Tidak ada lagi rasa takut untuk melakukan korupsi, bahkan korupsi sudah menjadi suatu kesempatan yang dicita-citakan (Mas, 2014, h. 192).

Terdapat faktor besar yang menyebabkan praktik korupsi. Melihat keadaan Indonesia terhadap isu korupsi yang ada, Ilham Gunawan menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor penyebab terjadinya korupsi yang terjadi Indonesia. Pertama, faktor politik yaitu faktor terkait kekuasaan. Hal ini didukung dengan rumusan penyelewengan penggunaan uang negara milik E. John Emerich Edward Dalberg Acton yang menyatakan bahwa kekuasaan cendurung korupsi dan kekuasaan yang absolut mengakibatkan korupsi secara absolut.

Kedua, faktor Yuridis yaitu faktor yang berkaitan dengan hukum, seperti lemahnya sanksi hukuman. Terdapat dua aspek dalam sanksi hukuman. Pertama, terdapat pada aspek peran hakin dalam menjatuhkan putusan. Aspek kedua, terdapat pada sanksi yang lemah berdasarkan bunyi pasal dan ayat peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.

Terakhir, faktor budaya yaitu berkaitan dengan kepribadian mental dan moral. Korupsi merupakan suatu peninggalan pandangan feodal yang memunculkan adanya benturan kesetiaan antara kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara (Mas, 2014, h. 11).

Pendapat lain diuraikan Khaldun yang secara singkat mengungkapkan penyebab terjadi korupsi dikarenakan adanya hawa nafsu untuk hidup mewah dalam kelompok yang memerintah. Korupsi yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan ini yang menyebabkan buruknya perekonomian yang menimbulkan tindak korupsi baru (Arsyad, 2013, h. 18).

Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dinilai seakan-akan telah menjadi sebuah budaya. Budaya yang ditonjolkan pun adalah budaya yang buruk, karena budaya yang baik tidaklah menganjurkan korupsi. Namun, Indonesia merupakan salah satu negara yang belum bisa melepaskan predikat sebagai negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Sulitnya memberantas korupsi di Indonesia, disebabkan masih banyaknya oknum pejabat negara dan anggota legislatif yang mengendalikan kekuasaan politik dan perekonomian Indonesia (Mas, 2014, h. 11).

Semakin maraknya kasus korupsi di Indonesia yang menyeret hampir semua institusi negara, tentu berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Besarnya kerugian yang diakibatkan karena ulah koruptor terhadap negara, juga berpengaruh pada masyarakat, termasuk mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Sementara dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, masyarakat mempunyai peranan. Masyarakat dapat melakukan peranannya dalam upaya pencegahan, pemberantasan, serta pengungkapan terhadap dugaan korupsi. Dalam upaya pencegahan, masyarakat dapat menjalankan perannya dengan aktif mengikuti pendidikan mengenai antikorupsi, bekeria sama dengan aparat hukum dan pemerintahan dalam mensosialisasikan antikorupsi, melakukan pengawasan terhadap pemerintahan, mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan, serta melakukan pembinaan dan pendidikan moral kepada masyarakat dan aparat negara untuk menanamkan nilai antikorupsi. Dalam upaya pemberantasan dan pengungkapkan korupsi, masyarakat berperan untuk melaporkan adanya dugaan korupsi kepada pihak kepolisian, kejaksaan dan KPK (Mas, 2014, h. 213).

2.2.2 MUSIK

Secara sederhana Baran (2012, h. 7), memaparkan pengertian komunikasi massa sebagai proses penciptaan makna bersama antara media massa dan khalayak banyak. Dalam hal ini, media massa dapat diartikan sebagai teknologi atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak, seperti surat kabar, radio, televisi dan internet.

Selain itu, komunikasi massa dapat dilakukan juga lewat sebuah seni, yang meliputi seni tari, teater, dan seni musik. Seni merupakan pandangan dari manusia yang menciptakannya, termasuk alasan yang mendasari suatu penciptaan karya seni dan makna keindahan yang terkandung dalam karya seni itu sendiri. Oleh karena itu, suatu karya seni terlahir dengan bentuk dan makna yang beragam (Jazuli, 2014, h. 32).

Dilihat dari fungsinya, seni merupakan sarana untuk mengobyektifkan pengalaman sehingga dapat dipahami makna yang terkandung di dalamnya (Kesuma, dkk., 1995, h. 1). Sementara tujuan diciptakannya sebuah karya seni cukup beragam, di antaranya karya seni untuk kebutuhan praktis, karya seni untuk mempromosikan, karya seni untuk menyampaikan pesan dan kritikan, ada pula karya seni yang diciptakan tanpa ada maksud tertentu dan hanya sebagai bentuk keindahan semata (Jazuli, 2014, h. 32).

Kesuma, dkk. (1995, h. 2), melihat fungsinya dikatakan bahwa seni dapat dijadikan sebagai media komunikasi yang bersifat simbolik. Salah satu seni yang sering dijadikan sebagai media komunikasi adalah seni musik. Seni musik merupakan salah satu cabang seni yang disampaikan dengan irama yang memiliki daya komunikasi massa tinggi dan seringkali digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang mengandung kritikan terhadap masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan.

Herbert Spencer mengungkapkan musik siap melayani manusia, terutama dalam kebutuhannya yang bersifat nonfisik. Didasari oleh kebutuhan-kebutuhan tersebut, musik diberi makna yang beragam pula yang disesuaikan dengan konteksnya. Artinya, musik dapat memiliki banyak arti, tergantung pada siapa yang melihat dan menikmatinya, bilamana dan di mana. Manusia membutuhkan musik sebagai alat untuk mengekspresikan diri (Kesuma, dkk., 1995, h. 2).

Menurut Ferdinandus (2006 dikutip dalam Pasaribu, 2008, h. 2), bicara mengenai sejarahnya, asal mula musik dapat dirunut mulai dari masa prasejarah hingga sekarang. Oleh karena itu, musik dijadikan sebagai salah satu kebutuhan masyarakat sosial. Musik diproduksi dan dikontrol perkembangannya oleh manusia. Manusia di masa lampau telah mengetahui dampak dari musik pada kehidupan, baik secara fisik maupun mental serta spiritual.

Tagg (dalam Pasaribu, 2008, h. 2) mengungkapkan secara sederhana musik dapat dideskripsikan bahwa penggunaan suatu struktur musik tertentu bertipe (A), untuk menyampaikan sebuah pesan (B), di dalam sebuah relasi bertipe (C), dalam konteks (D), dan menghasilkan sebuah respon bertipe (X). Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa musik memiliki dimensi yang sangat luas dan spesifik pada suatu tempat dan waktu tertentu.

2.2.2.1 MUSIK SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI MASSA

Musik merupakan salah satu karya seni yang berbentuk bunyi, yang kemudian dikemas ke dalam bentuk lagu atau komposisi musik yang mengungkapkan pikiran dan perasaan si penyair lewat unsur-unsur musik, seperti irama, melodi, harmoni, bentuk dan struktur lagu serta ekspresi sebagai satu kesatuan (Muttaqin, 2008, h. 15-16).

Berdasarkan manfaatnya, musik dapat digunakan sebagai alat komunikasi. Penggunaan musik sebagai alat komunikasi sudah digunakan sejak dahulu. Lewat bunyi-bunyi yang berpola ritmik dan adanya penggunaan alur-alur melodilah yang menandakan adanya fungsi komunikasi dalam musik. Misalnya, penggunaan terompet kerang yang digunakan oleh suku-suku bangsa pesisir sebagi alat komunikasi, selain itu teriak-teriak juga digunakan sebagai alat komunikasi oleh masyarakat asli yang hidup baik di pegunungan maupun di hutan (Muttaqin, 2008, h. 9).

Peran musik sebagai alat komunikasi juga dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang menggunakan musik untuk menggambarkan keadaan sosial. Beberapa musisi Indonesia yang peka terhadap keadaan sosial, tingkat kesejahteraan rakyat, dan kegelisahan masyarakat sering menggunakan musik untuk melakukan kritik sosial maupun protes lewat lagu yang diciptakannya terhadap pemerintahan. Musisi-musisi tersebut di antaranya, Iwan Fals, Ebiet G. Ade, Bimbo, Slank dan masih banyak lagi (Muttaqin, 2008, h. 10).

2.2.3 WACANA

Istilah wacana memiliki pengertian yang sangat luas. Luasnya pengertian mengenai islitah wacana ini dipengaruhi oleh perbedaan lingkup dan disiplin ilmu yang menggunakan istilah wacana tersebut. Dalam ilmu sosiologi, wacana merujuk pada hubungan antara konteks sosial dari penggunaan bahasa. Sementara dalam lingustik, wacana merupakan unit bahasa yang lebih besar dari kalimat (Eriyanto, 2001, h. 3).

Badara (2012, h. 16) menguraikan beragam pandangan mengenai pengertian wacana dari beberapa pakar. Menurut Hawtan (1992 dikutip dalam Badara, 2012, h. 16), wacana merupakan komunikasi kebahasaan yang terlihat sebagai sebuah pertukaraan antara pembicara dengan pendengar, sebagai sebuah kegiatan personal yang bentuknya ditentukan oleh tujuan sosialnya.

Sementara menurut Roger Fowler (Badara, 2012, h. 16), wacana merupakan komunikasi lisan atau tulisan yang dilihat dari titik pandang kepercayaan, nilai dan kategori yang masuk di dalamnya; kepercayaan di sini mewakili pandangan dunia; sebuah organisasi atau representasi dari pengalaman.

Konsep mengenai wacana sendiri mutakhir diperkenalkan oleh Michel Foucault. Menurutnya, wacana dipahami sebagai sesuatu yang memproduksi sebuah gagasan, konsep dan efek. Foucault menambahkan bahwa wacana dapat dideteksi, karena secara sistematis suatu gagasan, pendapat, konsep dan pandangan hidup terbentuk melalui suatu konteks sehingga dapat mempengaruhi cara berpikir dan bertindak (Eriyanto, 2001, h. 65).

Menurut Foucault, wacana memiliki ciri utama, yakni memiliki kemampuan untuk menjadi suatu himpunan wacana yang memiliki fungsi membentuk dan melestarikan hubungan-hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam kajiannya, Foucault menunjukan bahwa konsep seperti gila, waras, sakit, sehat, benar dan salah, sebenarnya bukanlah konsep abstrak yang datang dari langit, namun terbentuk dan terlestarikan dari wacana-wacana yang berkaitan dengan berbagai bidang, seperti ilmu kedokteran dan ilmu pengetahuan lainnya (Eriyanto, 2001, h. 76-77).

Jika melihat posisinya sebagai paradigma kritis, teori-teori tentang wacana tidak hanya dapat diartikan dari lingkungan linguistik. Seperti dijelaskan Eriyanto (2001, h. 19), Michael Foucault dan Althusser memperkenalkan konsep wacana secara umum dan abstrak, yaitu sebagai relasi dan praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Menurut Foucault, wacana diperkenalkan sebagai praktik sosial yang memiliki peran dalam mengontrol, menormalkan dan mendisiplinkan individu. Sementara, Althusser memperkenalkan bahwa wacana berperan dalam mendefinisikan individu dan memposisikan seseorang dalam posisi tertentu.

Guy Cook, seperti yang dijelaskan Eriyanto (2001, h. 9), terdapat tiga hal yang sentra dalam definisi wacana, yakni teks, konteks dan wacana. Pertama, Teks merupakan semua bentuk bahasa yang tidak hanya dalam bentuk kata-kata yang tercetak di lebar kertas, melainkan juga semua jenis ekspresi komunikasi, ucapan, musik, gambar, efek suara, citra, dan sebagainya. Kedua, konteks memasukkan semua keadaan dan hal-hal lain diluar teks dan yang mempengaruhi penggunaan bahasa, seperti partisipasi dalam bahasa, keadaan saat teks diproduksi, dan fungsi yang dimaksudkan. Ketiga, wacana diartikan sebagai gabungan dari teks dan konteks. Dari tiga hal tersebut, muncul istilah analisis wacana yang menggambarkan teks dan konteks secara bersamaan dalam proses komunikasi.

2.2.3.1 ANALISIS WACANA

Istilah analisis wacana merupakan suatu istilah yang pada umumnya sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu dan memiliki banyak pengertian. Namun, meski memiliki gradasi dalam berbagai pengertian, titik singgungnya adalah analisis wacana adalah analisis yang berkaitan dengan studi mengenai bahasa atau penggunaan bahasa (Eriyanto, 2001, h. 3).

Mohammad A.S. Hikam (dalam Eriyanto, 2001, h. 4) merumuskan tiga pandangan mengenai bahasa dalam analisi wacana. Pandangan

pertama merupakan pandangan kaum positivisme-empiris yang melihat bahasa sebagai jembatan antara manusia dengan objek di luar dirinya. Lebih jelasnya, pengalaman-pengalaman manusia dianggap dapat diekspresikan secara langsung melalui penggunaan bahasa tanpa ada gangguan, sejauh pemakaian pernyataan-pernyataan bersifat logis, sintaksis, dan ada hubungan dengan pengalaman empiris. Dalam pandangan ini, analisis wacana ditujukan untuk menggambarkan tata aturan kalimat, bahasa, dan pengertian bersama.

Pandangan kedua merupakan pandangan konstruktivisme yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran fenomenologi. Konstruktivisme menolak pandangan empirisme/ postivisme yang memisahkan subjek dan objek bahasa. Dalam pandangan aliran ini, bahasa dilihat tidak hanya sebagai alat untuk memahami realitas objektif dan yang dipisahkan dari subjek sebagai penyampai pernyataan, namun subjek dianggap dianggap sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana dan hubungan-hubungan sosialnya. Dalam pandangan ini, analisis wacana ditujukan sebagai analisis yang digunakan untuk membongkar maksud dan makna tertentu.

Pandangan ketiga merupakan pandangan kritis yang mengoreksi pandangan konstruktivisme yang dianggap kurang sensitif dalam proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis maupun institusional. Pandangan kontruktivisme yang belum sampai tahap menganalisis faktor-faktor hubungan kekuasaan inheren dalam setiap wacana hal tersebutlah yang membuat lahirnya paradigma kritis. Analisis

wacana dalam paradigma ini menekankan konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Untuk itu analisis wacana dipakai untuk membongkar kekuasaan yang ada pada setiap proses bahasa yang meliputi batasan-batasan apa yang diperbolehkan menjadi wacana, perspektif yang digunakan dan topik apa yang dibicarakan (Eriyanto, 2001, h. 4-6).

Dilihat berdasarkan pandangan yang dijelaskan di atas, analisis wacana masuk ke dalam kategori paradigma kritis. Paradigma kritis ini memiliki pandangan mengenai bagaimana suatu media dan berita pada akhirnya dapat dipahami secara keseluruhan dalam proses produksi dan struktur sosial. Pandangan kritis seringkali dibandingkan dengan pandangan pluralis. Perbandingan pandangan media antara kritis dan pluralis memperhitungkan filosofi media dan pandangan terhadap hubungan antara media, masyarakat dan filosofi hadirnya media di tengah masyarakat.

Pada paradigma pluralis yang bersumber dari pemikiran August Comte, Emile Durkheim, Max Weber, dan Ferdinand Tonnies pada intinya terdapat kepercayaan bahwa masyarakat merupakan wujud dari konsensus dan mengutamakan keseimbangan. Pluralis melihat masyarakat sebagai suatu kelompok yang bersifat kompleks, artinya, terdapat berbagai macama kelompok sosial yang saling mempengaruhi dalam suatu sistem yang pada akhirnya mencapai keseimbangan. Sementara paradigma kritis dipengaruhi oleh pemikiran Marxis yang melihat masyarakat sebagai suatu

sistem kelas. Paradigma ini melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang bersifat dominasi, dan media menjadi salah satu bagian dari sistem dominasi tersebut (Eriyanto, 2001, h. 20-21).

2.2.3.2 ANALISIS WACANA KRITIS

Dalam analisis wacana kritis atau *Critical Discourse Analysis*, wacana tidak hanya dipahami sebagai studi mengenai bahasa, namun juga menghubungkannya dengan konteks. Menurut pakar analisis wacana kritis, Fairclough dan Wodak, analisis wacana kritis melihat wacana, termasuk di dalamnya pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai bentuk dari praktik sosial. Mendeskripsikan wacana sebagai praktik sosial dapat menyebabkan munculnya suatu hubungan dialektika yang terjadi di antara peristiwa diskursifdengan situasi, institusi dan struktur sosial yang membentuknya. Analisis wacana kritis menggunakan bahasa untuk melihat ketimpangan kekuasaan yang terjadi di masyarakat. Mengutip pernyataan Fairclough dan Wodak, analisis wacana kritis menyelidiki bagaimana penggunaan bahasa dapat membuat kelompok sosial saling berargumen dengan versinya masing-masing (Eriyanto, 2001, h. 7).

Teun A. van Dijk, Fairclough dan Wodak, seperti dijelaskan Eriyanto (2001, h. 8-14), terdapat karakteristik utama dalam analisis wacana kritis. Pertama, Tindakan. Pemahaman mengenai wacana diasosiasikan sebagai bentuk tindakan dan interaksi. Dalam pemahaman

ini, terdapat beberapa konsekuensi terkait cara pandang. Pertama, wacana dipandang sebagai suatu hal yang bertujuan. Kedua, wacana dipandang sebagai sesuatu yang diekspresikan. Kedua, konteks. Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari sebuah wacana, seperti latar, kondisi, peristiwa, dan situasi. Menurut Guy Cook, analisis wacana kritis juga melihat konteks dari segi komunikasi, seperti siapa yang mengkomunikasikan dengan siapa dan mengapa, dalam situasi apa, melalui media apa, dan hubungan untuk setiap masing-masing pihak.

Ketiga, Historis. Salah satu aspek penting agar dapat lebih mudah mengerti suatu teks adalah dengan menempatkan wacana ke dalam konteks historis. Pemahaman tentang wacana teks dapat diperoleh bila memasukkan konteks historis pada teks yang diciptakan. Keempat, kekuasaan. Elemen kekuasaan juga dipertimbangkan dalam analisis wacana kritis. Setiap wacana yang muncul, baik dalam bentuk teks, percakapan, atau apapun dianggap tidak bukanlah sesuatu yang alamiah, wajar dan netral, namun merupakan bentuk pertarungan.

Terakhir, ideologi. Konsep yang bersifat sentral dalam analisis wacana kritis adalah ideologi. Hal ini dikarenakan teks, percakapan dan lainnya merupakan bentuk dari praktik ideologi. Wacana ini dimaksudkan sebagai medium yang digunakan kelompok dominan untuk mempersuasi dan mengkomunikasikan pada publik dalam memproduksi kekuasaan dan dominasi yang dimiliki, hingga tampak absah dan benar.

Terdapat beberapa model analisis wacana dari beberapa pakar yang diperkenalkan dan dapat digunakan dalam melakukan analisis wacana kritis, di antaranya Roger Fowler, Robert Hodge, Gunther Kress, dan Tony Trew; Theo van Leeuwen; Sara Mills; Teun A. van Dijk; serta Norman Fairclough.

Eriyanto (2001, h. 342-349) menjelaskan secara singkat, terdapat perbedaan pola disetiap model yang diperkenalkan dan perbedaan utama terletak pada hubungan teks dengan konteks sosial masyarakat yang dijelaskan dalam masing-masing model.

Tabel 2.2
Perbedaan Model Analisis Wacana Kritis

MODEL	Tingkat Analisis		
	Mikro (teks)	Meso	Makro (sosial)
Roger Fowler,	•		•
Robert Hodge,			
Gunther Kress, and	III A		
Tony Trew	IW		u
Theo van Leeuwen	0.0	9 9	
Sara Mills	•		•
Teun A. van Dijk			•

Norman Fairclough		

Dalam analisis wacana secara umum terdapat tiga tingkatan analisis, yakni analisis mikro yang menyangkut analisis pada teks semata yang lebih melihat unsur bahasa yang digunakan. Kemudian analisis Meso yang merupakan analisis terhadap individu sebagai penghasil teks serta analisis dari sisi khalayak sebagai konsumen teks. Terakhir, analisis tingkat makro yang merupakan analisis terhadap struktur sosial, ekonomi, politik serta budaya masyarakat. Pada analisis tingkat ini, menggambarkan kekuatan-kekuatan yang dominan yang terdapat dalam masyarakat menentukan wacana yang kemudian dikembangkan dan disebarkan kepada khalayak, serta menyangkut institusi medianya sendiri, baik secara ekonomi maupun politik media di tengah masyarakat.

Analisis wacana model Roger Fowler, Robert Hodge, Gunther Kress, dan Tony Trew memusatkan perhatian pada tata bahasa atau *grammar* tertentu serta pilihan kosakata tertentu membawa implikasi dan ideologi tertentu. Fowler dkk. membangun model analisis ini berdasarkan pada penjelasan Halliday terkait dengan struktur dan fungsi bahasa yang digunakan sebagai alat untuk dikomunikasikan kepada khalayak (Eriyanto, 2001, h. 133).

Analisis model Roger Fowler dkk. ini menganggap bahwa bahasa yang digunakan media bukan suatu hal yang netral, namun memiliki aspek atau nilai ideologis tertentu. Terdapat dua hal yang dapat diperhatikan dalam model analisis ini. Pertama, level kata yang melihat bagaimana peristiwa dan aktor-aktor di dalamnya hendak dibahasakan. Penggunaan kata-kata ini tidak hanya dianggap sebagai petanda atau identitas saja, melainkan ada keterkaitannya dengan ideologi tertentu. Kedua, level kalimat yang lebih menekankan pada bagaimana pola pengaturan, penggabungan, serta penyusunan dapat menimbulkan efek tertentu (Eriyanto, 2001, h. 164-165).

Berbeda dengan Roger Fowler dkk., model analisis yang dikenalkan oleh Theo van Leeuwen mengaitkan wacana dengan kekuasaan. Van Leeuwen membangun model analisisnya untuk melihat bagaimana suatu peristiwa dan aktor-aktor sosial ditampilkan dalam suatu media, serta melihat bagaimana suatu kelompok yang tidak memiliki akses menjadi pihak yang termarjunalkan. Terdapat dua pusat perhatian dalam model ini. Pertama, proses pengeluaran atau *exclusion* yang menunjukan apakah aktor sosial dihilangkan atau disembunyikan dari pemberitaan, dan strategi wacana apa yang digunakan untuk menyembunyikannya. Kedua, proses pemasukan atau *inclusion* yang berhubungan dengan bagaimana aktor sosial ditampilkan lewat pemberitaan (Eriyanto, 2001, h. 171-192).

Sementara analisis wacana model Sara Mills memfokuskan perhatian pada wacana yang terkait dengan feminisme yang melihat bagaimana wanita ditampilkan dalam sebuah teks, gambar, foto ataupun pemberitaan. Sasaran utama dalam model Mills ini adalah ketidakadilan

dan penggambaran terhadap wanita yang cenderung ditampilkan sebagai pihak yang salah dan marjinal. Namun, model analisis wacana ini dapat juga digunakan dalam menganalisis teks berita. Sara Mills dengan menggunakan analisis Althusser lebih menekankan pada bagaimana aktor diposisikan dalam teks berita. Posisi ini dilihat sebagai pensubjekan seseorang yang di antaranya, satu pihak yang memiliki posisi sebagai penafsir dan pihak lain sebagai sebagai objek yang ditafsirkan (Eriyanto, 2001, h. 199-210).

Terdapat dua hal yang difokuskan pada analisis ini secara umum. Pertama, bagaimana aktor sosial dalam berita diposisikan dalam pemberitaan. Hal ini menyangkut siapa yang diposisikan sebagai pihak penafsir teks untuk memaknai peristiwa, serta apa akibatnya. Kedua, bagaimana pembaca diposisikan dalam teks. Teks berita sebagai hasil dari negoisasi antara penulis dengan pembaca (Eriyanto, 2001, h. 210-211).

Analisis wacana lainnya, juga diperkenalkan oleh Teun A. van Dijk. Model analisis van Dijk sering disebut sebagai "kognisi sosial". Hal ini dikarenakan, menurut van Dijk penelitian atas wacana tidaklah cukup didasari pada analisis teks saja, namun harus dilihat juga bagaimana teks tersebut diproduksi, hingga menghasilkan pengetahuan mengenai alasan mengapa menghasilkan sebuah teks. Wacana oleh van Dijk digambarkan memiliki tiga dimensi, yakni teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Dalam analisis van Dijk, ketiga dimensi wacana tersebut digabungkan ke dalam satu kesatuan analisis. Pada dimensi teks, analisis van Dijk bekerja

dengan meneliti bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang digunakan untuk menegaskan suatu tema tertentu. Dalam dimensi kognisi sosial, melihat proses produksi teks melalui kognisi individu pencipta teks. Sedangkan, dalam dimensi konteks mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah. Dapat disimpulkan bahwa analisis model van Dijk menghubungkan analisis teks ke arah analisis yang lebih komprehensif bagaimana teks diproduksi,baik dalam hubungan dengan pencipta teks maupun dengan masyarakat (Eriyanto, 2001, h. 221-224).

Sama halnya dengan van Dijk, analisis wacana model Norman Fairclough, seperti yang dijelaskan Eriyanto (2001, h. 285-332) juga menggunakan tiga tingkatan dalam melakukan analisisnya. Fairclough berusaha mengaitkan analisis teks pada level mikro dengan konteks sosial yang lebih besar, serta berusaha mendeteksi dan menghubungkan wacana media dengan bentuk wacana umum lain yang terjadi dalam masayrakat modern. Dalam tahap analisis, ketiga level dilakukan secara bersamaan. Dalam model ini, Fairclogh lebih menegaskan bahwa wacana media merupakan suatu bidang yang kompleks.

Dalam modelnya, Fairclough membagi analisisnya ke dalam tiga tingkatan dimensi. Pertama, analisis *deskripsi* yang bertujuan menguraikan isi dan analisis pada teks secara deskriptif. Pada dimensi ini, teks tidak dikaitkan dengan aspek lain. Kedua, *interpretasi* merupakan penafsiran teks yang dihubungkan dengan praktik wacana yang dilakukan. Dalam

dimensi ini, teks tidak dianalisis secara deskriptif, melainkan teks ditafsirkan dengan menghubungkan dengan proses produksi teks. Ketiga, *eksplanasi* yang bertujuan untuk mencari penafsiran pada tahap kedua. Artinya, penafsiran pada tahap kedua ini diperoleh dengan mengaitkan produksi teks dengan praktik sosiokultural suatu media.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk dalam menganalisis lirik lagu berjudul *Bangsat* dan *Rekening Gendut* yang mengutarakan wacana antikorupsi.

2.3 KERANGKA PEMIKIRAN

Berikut kerangka pemikiran yang digunakan peneliti dengan menggunakan analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk mengenai wacana antikorupsi dalam lirik-lirik lagu *Bangsat* dan *Rekening Gendut* karya Iwan Fals.

